

ABSTRAK

Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dalam menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup wilayahnya. Salah satu tugasnya adalah mengawasi pemenuhan K3 oleh perusahaan kepada pekerja, menyelenggarakan upaya preventif seperti pembinaan, serta memberikan tindak lanjut jika terdapat pelanggaran. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan K3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta mengetahui tindak lanjut dari pengawasan ketenagakerjaan terkait dengan K3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang dilakukan dengan cara menggabungkan analisis hukum dan penelitian lapangan untuk mendapatkan hasil yang komprehensif terkait pengawasan ketenagakerjaan K3. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Kemudian, metode analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan K3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan masih terdapat kendala-kendala, seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), ketidaklengkapan data perusahaan, serta penolakan dari pihak perusahaan. Kedua, bahwa tindak lanjut pengawasan ketenagakerjaan terkait dengan K3 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan memberikan Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II belum berjalan secara maksimal karena lemahnya proses pemantauan/*monitoring* dari pihak pegawai pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan alokasi anggaran pengawasan, penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan, serta pembuatan aplikasi khusus untuk proses tindak lanjut dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dan proses pemantauan/*monitoring* tindak lanjut.

Kata Kunci: Pengawas Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah